

Dosa Akademia:
Mementingkan Kompetensi Daripada Kontribusi
Rhiza S. Sadjad
Dosen Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin MAKASSAR



Karena heboh ditangkapnya Ketua MK, hampir-hampir terlewat berita memalukan dari media *on-line* nasional ini: “Direktur Pendidik dan Tenaga Kependidikan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Ditjen Dikti) Kemdikbud Supriadi Rustad memaparkan, ada sekitar 100 dosen setingkat lektor kepala yang terbukti memalsukan karya tulis. Mereka ada yang berasal dari perguruan tinggi negeri (PTN) maupun swasta (PTS)” (*Suara Pembaruan*, 3 Oktober 2013). Judul berita tersebut lebih menyeramkan lagi: “*400 PTS di Black List, 100 Dosen Palsukan Karya Tulis jadi Guru Besar*”. Politisi biasa dituding membuat “kebohongan publik”, tapi kalau akademisi melakukan “kebohongan publikasi”, maka dia menanggung dosa yang sangat besar. Di dunia akademika yang lebih beradab, melakukan “kebohongan publikasi” bisa dianggap kejahatan yang lebih dahsyat dari memperkosa isteri/suami profesor!

Kejahatan yang dilakukan oleh satu-dua orang mungkin bisa dikatakan sebagai “perbuatan oknum”. Tapi kalau dilakukan oleh sampai ratusan orang, tentunya bukan lagi merupakan kejahatan biasa. Pasti ini merupakan “dampak sistemik” dari suatu kebijakan yang keliru, sehingga mendorong banyak orang untuk menempuh jalan yang sesat. Perlu dilakukan pelacakan yang teliti untuk mencari akar permasalahannya dan sekaligus memperbaikinya.

Ketika Belanda dengan “Politik Etis”-nya mulai mendirikan sekolah-sekolah untuk pribumi di negeri ini lebih 100 tahun yang lalu, orientasi kurikulum-nya adalah menghasilkan lulusan yang **kompeten** untuk mengisi lowongan kerja pada sistem kolonial yang mulai mapan waktu itu. Begitu banyaknya lowongan kerja, sehingga seandainya pun seluruh penduduk Negeri Belanda pindah ke negeri ini, tidak pernah akan cukup mengisinya. Oleh karena itu, mau tidak mau, sang penjajah harus berupaya mendidik anak-anak pribumi agar bisa mengisi lowongan kerja sebanyak mungkin, bekerja sepenuhnya melayani kepentingan kolonial, sehingga cukup sedikit saja orang Belanda *totok* yang harus ditugaskan berdomisili di negeri jajahannya ini.

Setelah hampir 70 tahun merdeka, kurikulum pendidikan tinggi di negeri ini masih disusun persis sama seperti pada jaman kolonial, yaitu ber-orientasi pada profil lulusan yang kompeten untuk mengisi lowongan kerja yang tersedia. Umumnya program studi di perguruan tinggi merevisi kurikulum-nya setiap 5 (lima) tahun sekali. Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi menganjurkan (bahkan hampir-hampir mewajibkan) agar setiap kali dilakukan revisi kurikulum terlebih dahulu dilakukan *tracer-study* (penelusuran alumni) dan analisis pasar kerja (*job-market*

analysis) untuk menentukan profil lulusan yang akan dihasilkan. Pendekatan semacam ini disebut sebagai penyusunan Kurikulum Berbasis Kompetensi (*Competency-based Curriculum*) yang populer disingkat KBK. Alhasil, dalam menyusun kurikulum-nya, semua program studi perguruan tinggi di negeri ini berharap bahwa lulusan yang dihasilkannya akan sedemikian kompeten dalam bidang-studi-nya masing-masing sehingga akan mudah mendapatkan pekerjaan. Salah satu ukuran keberhasilan program-studi adalah rata-rata lamanya lulusan menunggu sampai mendapat pekerjaan.

“Mission Impossible”

Menyusun kurikulum berdasarkan profil lulusan yang diharapkan cukup kompeten di bidang-studi-nya sehingga mudah mencari pekerjaan sama-sekali tidak mudah, bahkan hampir-hampir seperti “*mission impossible*”. Ketika misalnya tahun ini kita melakukan *tracer-study* dan *job-market analysis* untuk me-revisi kurikulum, lulusan yang dihasilkan beberapa tahun ke depan kemungkinan besar akan mendapati lowongan kerja yang dituju oleh orientasi kurikulum-nya sudah tidak ada. Tidak ada yang mampu mem-prediksi secara tepat bagaimana kondisi pasar kerja pada masa yang akan datang. Kompetensi yang berhasil diraih lulusan seperti tidak lagi bermanfaat dalam pekerjaan yang diperolehnya. Kurikulum jadi kehilangan relevansi, tidak pernah akan terjadi “*link and match*” antara dunia pendidikan dan dunia kerja seperti yang selama ini dibayangkan. Revisi kurikulum yang bagaimana pun canggihnya, tidak akan pernah bisa mengejar dinamika pasar kerja yang begitu cepat berubah.

Penyusunan kurikulum dengan pendekatan KBK juga mengakibatkan (kebanyakan) perguruan tinggi di negeri ini mengalami degradasi, dari yang semestinya mengemban misi akademia (sejak jaman Socrates 2500 tahun lalu) untuk melestarikan dan mengembangkan ilmu-pengetahuan dan teknologi, menjadi seperti lembaga pelatihan lanjutan yang mengantar anak-anak lulusan sekolah menengah untuk memasuki lapangan pekerjaan. Dosen-dosen umumnya jadi sibuk mengajari mahasiswanya agar menjadi manusia “seutuhnya” yang kompeten dalam bidangnya, dan cepat mendapat pekerjaan setelah lulus. Kebanyakan baru ingat untuk meneliti dan menyusun publikasi ilmiah karena desakan harus naik pangkat/jabatan atau ujian sertifikasi. Seolah-olah pekerjaan Tri Dharma, yaitu pengajaran, penelitian dan pengabdian pada masyarakat, tidak menyatu secara integral, masing-masing dikerjakan untuk masing-masing keperluannya. Tidak heran jika selama ini **kontribusi** akademisi Indonesia kepada upaya peradaban modern untuk melestarikan dan mengembangkan ilmu-pengetahuan dan teknologi sangat minimal, di-indikasi-kan dengan kurangnya karya-ilmiah yang terpublikasikan, lisensi dan paten yang dihasilkan oleh putera-puteri bangsa ini. Segala skema dan upaya, baik berupa insentif, penghargaan mau pun ancaman, “*reward*

and punishment”, “*stick and carrot*”, dan berbagai cara lain telah dilakukan untuk mendorong kontribusi akademisi Indonesia, tapi sepertinya sia-sia belaka. Sistem ini malah ujung-ujungnya menyuburkan tindak kejahatan akademik berupa “pembohongan publikasi”, sebagaimana berita yang dikutip pada awal tulisan ini.

“*R&D-based Curriculum*”

Memang selama ini rupanya penyusunan kurikulum pendidikan tinggi di negeri ini masih setia menggunakan pendekatan kolonial yang ber-orientasi pada profil lulusan, yang ber-basis **kompetensi**. Kurikulum pendidikan tinggi tidak menuntut **kontribusi** maksimal pada upaya pelestarian dan pengembangan ilmu-pengetahuan dan teknologi. Mahasiswa S1 dan S2, bahkan mahasiswa S3 pada beberapa kasus, untuk mendapatkan suatu gelar akademik, tidak pernah atau sangat kurang dituntut oleh kurikulum program-studi-nya memberikan kontribusi nyata pada misi akademia melestarikan dan mengembangkan ilmu-pengetahuan dan teknologi. Ambil kasus perguruan tinggi keteknikan, misalnya, yang di negeri ini bisa dikategorikan menjadi Akademi, Politeknik, Sekolah Tinggi Teknik, Fakultas Teknik di suatu Universitas dan Institut Teknologi. Lulusan dari kelima kategori pendidikan tinggi keteknikan itu hampir serupa saja satu sama lain, baik lulusan program Diploma mau pun program Sarjana, karena memang mengacu pada profil lulusan yang sama, dan kurikulumnya dirancang dan disusun dengan pendekatan yang sama, yaitu pendekatan KBK. Untuk Akademi, Politeknik dan Sekolah Tinggi tentu KBK memang sesuai dengan misinya untuk menghasilkan tenaga kerja, tapi sama-sekali tidak cocok jika diterapkan pada Universitas dan Institut yang mengemban misi akademia melestarikan dan mengembangkan ilmu-pengetahuan dan teknologi.

Kompetensi baru berupa potensi, sedangkan yang dituntut dari Universitas dan Institut adalah kontribusi karya nyata. Ibaratnya bayi yang sedang menyusui, maka selama mengikuti program pendidikan, mahasiswa selama ini hanya diberi kesempatan untuk “menetek” terus pada almamater-nya, tidak pernah diberi kesempatan untuk mencoba mem-produksi air susu itu sendiri. Oleh karena itu, perlu dilakukan perubahan orientasi penyusunan kurikulum, dari KBK ke “*R&D-based Curriculum*” (kurikulum berbasis penelitian dan pengembangan, *Research and Development, R&D*), perubahan orientasi dari **kompetensi** ke **kontribusi**. Suatu Universitas atau Institut tidak hanya diharapkan akan menghasilkan lulusan yang kompeten pada bidangnya seperti Akademi, Politeknik dan Sekolah Tinggi, tapi lebih dari itu, mereka harus menghasilkan kontribusi berupa karya nyata dalam bentuk inovasi kreatif, publikasi ilmiah nasional dan internasional, lisensi, paten, dan lain-lain.

Dalam *R&D-based Curriculum*, mahasiswa program S-1, misalnya, hanya dituntut untuk

sibuk mengikuti perkuliahan di kelas sampai maksimum semester ke-6 (akhir tahun ketiga). Selanjutnya mereka diharuskan mengikuti kegiatan penelitian dan pengembangan (*R&D*) bersama “kakak-kakak” mereka di program S-2 dan S-3 (kalau ada), serta “bapak-ibu” mereka para dosen dan gurubesar. Jadi konsep KBK dapat diterapkan sampai semester ke-6 saja, yaitu untuk mengantar mahasiswa program S-1 agar cukup kompeten untuk berperan-serta bersama akademisi lainnya yang lebih “senior”, ber-kontribusi nyata kepada pelestarian dan pengembangan ilmu-pengetahuan dan teknologi. Dengan demikian, laboratorium yang saat ini lebih banyak digunakan sebagai tempat praktikum pendukung perkuliahan (*teaching lab*), dalam pelaksanaan *R&D-based curriculum* nantinya akan lebih berfungsi sebagai tempat melaksanakan kegiatan penelitian dan pengembangan (*research lab*).

Dengan melaksanakan *R&D-based Curriculum* sebagai pengganti KBK, atau mengubah orientasi kurikulum dari kompetensi ke kontribusi, para akademisi tidak akan lagi terlalu disibukkan dengan kegiatan mengajar saja. Mereka secara rutin mendapat bantuan “pasukan” mahasiswa tahun terakhir untuk seluas-luasnya mengembangkan kegiatan penelitian dan pengembangan, ber-kontribusi secara nyata kepada pelestarian dan pengembangan ilmu-pengetahuan dan teknologi, sesuai dengan misi akademik yang hakiki. Publikasi - bukan hanya wisudawan - merupakan “produk” rutin dunia akademik, sehingga akademisi juga tidak perlu berbuat dosa akademia, melakukan pembohongan publikasi untuk sekedar naik pangkat/jabatan. Dan mahasiswa pun tidak perlu menunggu sampai mereka menjadi alumni untuk menunjukkan “kehebatan” mereka, karena sebelum lulus pun mereka telah mendapat kesempatan untuk itu. Lebih dari itu, setidak-tidaknya dunia pendidikan tinggi kita bisa memerdekakan dirinya dari paradigma kolonial, yaitu menyelenggarakan pendidikan tinggi semata-mata hanya untuk menghasilkan tenaga-kerja yang cukup kompeten mengisi berbagai lowongan kerja yang tersedia. Lulusan perguruan tinggi kita sudah seharusnya pernah membuktikan kemampuannya ber-kontribusi nyata kepada pengembangan ilmu-pengetahuan dan teknologi ketika masih berada di kampus, sehingga kita percaya mereka akan mampu dan kompeten - tidak saja bekerja mengisi lowongan kerja yang tersedia - tapi lebih dari itu, mereka pasti akan mampu menciptakan pekerjaan dengan karya nyata mereka, setidak-tidaknya pekerjaan untuk diri mereka sendiri, tanpa tergantung pada lowongan kerja yang disediakan orang lain.

Rhiza S. Sadjad adalah Dosen pada Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin, Makassar.